

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

1.1.1 Profil Badan Kesbangpol Pemerintah Kota Makassar

Awal kota dan bandara Makassar berada di muara Sungai Tallo dengan pelabuhan niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad XV. Sumber-sumber Portugis memberitakan, bahwa bandar Tallo itu awalnya berada di bawah Kerajaan Siang di sekitar Pangkajene. Pada pertengahan abad XVI, Tallo bersatu dengan sebuah kerajaan kecil lainnya yang bernama Gowa, dan mulai melepaskan diri dari kerajaan Siang, bahkan menyerang dan menaklukkan kerajaan-kerajaan sekitarnya.

Akibat semakin intensifnya kegiatan pertanian di hulu sungai Tallo, mengakibatkan pendangkalan sungai Tallo, sehingga bandarnya dipindahkan ke muara sungai Jeneberang, disinilah terjadi pembangunan kekuasaan kawasan istana oleh para ningrat Gowa-Tallo yang kemudian membangun pertahanan benteng Somba Opu, yang seratus tahun kemudian menjadi wilayah inti Kota Makassar. Pada masa pemerintahan Raja Gowa XVI, didirikan Benteng Rotterdam, pada masa itu terjadi peningkatan aktivitas pada sektor perdagangan lokal, regional dan internasional, sektor politik serta sektor pembangunan fisik oleh kerajaan. Masa itu merupakan puncak kejayaan Kerajaan Gowa, namun selanjutnya dengan adanya perjanjian Bungaya menghantarkan Kerajaan Gowa pada awal keruntuhan. Komoditi ekspor utama Makassar adalah beras, yang dapat ditukar dengan rempah-rempah dari Maluku maupun barang-barang manufaktur asal Timur Tengah, India dan Cina di Nusantara Barat. Dari laporan saudagar Portugal maupun catatan-catatan lontara setempat, diketahui bahwa peranan penting saudagar Melayu dalam perdagangan yang berdasarkan pertukaran hasil pertanian dengan barang-barang impor. Dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya, yang pada umumnya berbasis agraris, maka Makassar menguasai kawasan pertanian yang relatif luas dan berusaha pula untuk membujuk para saudagar di kerajaan sekitarnya agar pindah ke Makassar, sehingga kegiatan perdagangan semakin terkonsentrasi di bandar niaga baru Makassar.

Hanya dalam seabad saja, Makassar menjadi salah satu kota niaga terkemuka dunia yang dihuni lebih 100.000 orang (kota terbesar ke 20 dunia).

Maka dari itu, Ketika kita bicara tentang wawasan kebangsaan di era sekarang ini paling tidak dua hal pokok yang menjadi fokus perhatian, pertama, dinamika persoalan bangsa yang semakin majemuk dan tantangan yang dihadapi makin besar. Pada saat yang sama tuntutan masyarakat semakin beragam, sehingga, tatkala aparat pemerintah kurang siap menghadapi dan menyelesaikan pokok persoalan atau inti permasalahannya untuk kemudian menyiapkan solusi yang aplikatif. Yang dimaksud itu adalah ketika deviasi atau kesenjangan patriotisme dan nasionalisme berhadapan dengan individualisme, hedonisme, perilaku dan peradaban yang mulai bergeser. Kedua, selain tantangan internal diatas, tidak kalah krusialnya ketika kita pun harus mengelaborasi tantangan global dan eksternal. Oleh karena itu kemudian muncul wawasan bela Negara. Walau ini bukan gagasan baru, namun sangat vital dan strategis menjawab tantangan tadi, bahwa pendidikan bela Negara merupakan alternatif untuk menjawab persoalan bangsa dari sudut perspektif berbangsa dan bernegara yang bermuara pada perubahan paradigma nasionalisme itu dalam menganeksasi pengaruh negatif yang mempengaruhi atau bahkan mereduksi nasionalisme itu.

Oleh karenanya Pemerintah Kota Makassar melalui satuan kerja perangkat daerah yaitu, Badan Kesbangpol harus mampu mempersiapkan program dan menyusun kebijakan yang substansinya mendorong kebanggaan mentalitas patriotisme generasi muda, juga mengenalkan sikap dasar yang seyogyanya dimiliki setiap anak bangsa.

Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Makassar, sangat besar peran dan pengaruhnya terhadap perkembangan leading sektor pembangunan (SKPD Kota Makassar) karena merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas kesatuan bangsa, ketertiban masyarakat, kemasyarakatan, dan ketahanan nasional agar tetap utuhnya NKRI khususnya di Kota Makassar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar menghadapi beberapa tantangan dari berbagai segi seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Diantara berbagai segi dimaksud, sosial budaya merupakan salah satu bidang yang mempunyai tantangan yang berat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di Kota Makassar sebagai ibukota provinsi didiami oleh 3 (tiga) suku bangsa. Sulawesi Selatan yakni, Bugis, Makassar, dan Toraja ditambah dengan suku-suku lain dari luar Sulawesi Selatan. Kesemua suku bangsa ini, baik suku bangsa yang ada di Sulawesi Selatan maupun

suku bangsa diluar Sulawesi Selatan memiliki latar belakang, adat istiadat (budaya) yang tidak sama ditambah lagi latar belakang ekonomi dan sosial lainnya yang tidak sama. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menciptakan atau mewujudkan keadaan yang kondusif bagi masyarakat Makassar. Tantangan lain yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar adalah tingkat kriminalitas yang setiap saat mengalami peningkatan, seperti perang kelompok, geng motor dan kenakalan lainnya yang dipicu oleh semakin berkembangnya Kota Makassar sebagai salah satu kota tujuan alternatif selain Jakarta.

Untuk itu, upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar adalah dengan melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan harmonisasi hubungan antara suku bangsa kenakalan remaja, kriminalitas dan persoalan lainnya yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan keutuhan Negara Republik Indonesia, termasuk kerjasama dengan instansi vertikal untuk saling tukar informasi dan melakukan koordinasi yang intens demi untuk mewujudkan ketentraman masyarakat, termasuk gangguan terorisme.

Perubahan sistem pemerintahan dan sistem politik di Indonesia berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku masyarakat khususnya dalam menyampaikan setiap tuntutan atau kepentingan dengan cara melakukan demonstrasi ketimbang menyalurkan aspirasinya melalui wakil-wakilnya di DPR atau DPRD. Selain itu faktor lain yang mempunyai kontribusi besar terhadap perubahan masyarakat termasuk masyarakat Makassar adalah pertumbuhan ekonomi yang berdampak pula pada perbaikan kesejahteraan masyarakat. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah tingginya minat masyarakat untuk melakukan migrasi kedaerah perkotaan seperti Kota Makassar, baik migrasi antar daerah, migrasi antar pulau maupun migrasi di negara lain. Akibat dari semakin naiknya tingkat migrasi ke kota Makassar berakibat munculnya banyak persoalan-persoalan ditengah-tengah masyarakat, antara lain kenakalan remaja seperti, perang kelompok, geng motor, kriminalitas lainnya yang juga dilakukan oleh orang-orang yang masuk ke kota Makassar, termasuk bahaya laten terorisme yang sementara marak di beberapa daerah.

Untuk menangani persoalan-persoalan tersebut, tentunya membutuhkan penanganan yang terintegritas antar instansi terkait dengan memberikan kewenangan yang besar kepada instansi penanggungjawab, dengan pemberlakuan Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar yang merupakan salah satu peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar untuk lebih eksis, dibantu oleh instansi vertikal lainnya untuk melaksanakan tugas pokoknya, yakni menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dengan melakukan kegiatan-kegiatan antisipasi antara lain melalui kegiatan sosialisasi, bintek dan lain-lain yang bertujuan sebagai alat deteksi dini menanggulangi kemungkinan terjadinya persoalan ditengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang merupakan salah satu peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk lebih eksis, selain itu terbitnya berbagai macam peraturan perundang-undangan baru di bidang kesatuan bangsa dan politik juga merupakan peluang lain yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang juga merupakan salah satu satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar harus di jadikan ruang untuk mengetahui seluk beluk institusi juga kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilakukan, sedang dan akan dilaksanakan selanjutnya sehingga dapat menjadi referensi efektif bagi siapapun yang membacanya, agar pembaca tahu dan mengerti dan pada saat yang sama dijadikan acuan untuk merumuskan kegiatan-kegiatan yang menelorkan gagasan-gagasan baru dan cerdas serta kegiatan yang bersentuhan dengan sisi-sisi kebangsaan kita dimasa depan.

Berdasarkan Sejarahnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, senantiasa memberikan pelayanan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan memprioritaskan program strategis dan arah kebijakan, yakni tercapainya sasaran program dengan baik, hal ini dapat terlaksana disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah pegawai Badan Kesbangpol Kota Makassar dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar dapat terlaksana dengan baik.

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar dapat dilihat pada hasil dan dokumen laporan yang difokuskan pada pembinaan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan serta peningkatan kinerja dan profesionalitas aparatur.

1.1.2 Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

Mewujudkan masyarakat demokratis, damai, sejahtera melalui pemerintahan dan pembangunan kota dunia.

b. Misi

- 1) Pengembangan pendidikan politik masyarakat dan organisasi politik dalam mewujudkan sistem pemerintahan dunia.
- 2) Meningkatkan rasa aman dalam rangka menunjang kelancaran pembangunan dan tata ruang serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Peningkatan wawasan kebangsaan dalam mewujudkan ketahanan nasional.
- 4) Meningkatkan tata pemerintahan yang baik dengan perwujudan pelayanan prima.

c. Tujuan

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, berbudaya dan religious.
- 2) Meningkatnya integritas, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesadaran bela negara.
- 3) Mewujudkan masyarakat yang paham tentang wawasan kebangsaan
- 4) Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, sarana, dan prasarana aparatur yang memadai dan aparatur yang siap bekerja.

1.1.3 Logo Pemerintahan

Berikut adalah logo dari Kantor Pemerintah Kota Makassar :



Gambar 1.1 Logo Pemerintahan Kota Makassar

Sumber: Pemerintahkotamakassar.co.id

Setiap logo memiliki arti dan filosofi tersendiri. Mulai dari garis, gambar, simbol, dan warna. Beda bentuk dan beda warna maka beda pula makna dan pesan yang terkandung didalamnya. Begitupun dengan logo yang sering kita lihat diberbagai media lokal, poster, dan di Internet, logo kota Makassar.

Lambang kota Makassar jika dilihat sekilas, seperti sebuah perisai yang berisi gambar sebuah kapal. Di atas perisai tersebut terdapat sebuah tembok yang kokoh berwarna merah. Di bawah perisai terdapat sebuah pita merah yang bertuliskan sebuah kalimat, yang sudah pasti mengandung makna dan pesan-pesan tertentu.

Berikut, adalah Arti dari Lambang Kota Makassar yang dikutip dari situs Pemerintah Kota Makassar.

a. Perisai

Perisai merupakan tameng yang telah lama dikenal dalam budaya dan peradaban Nusantara sebagai senjata yang melambangkan perlindungan, pertahanan dan perjuangan diri untuk mencapai tujuan. Warna putih sebagai dasar melambangkan kesucian.

b. Kapal Pinisi

Sebuah Kapal layar tradisional khas yang berasal dari Suku Bugis dan Suku Makassar yaitu Pinisi. Kapal ini memiliki dua tiang layar utama dan tujuh buah layar, yaitu tiga di ujung depan, dua di depan, dan dua di belakang. Dua tiang layar utama tersebut berdasarkan 2 kalimat syahadat dan tujuh buah layar merupakan jumlah dari surah Al-Fatihah. Keberadan Pinisi layarnya sedang berkembang melambangkan bahwa Kota Makassar sejak dahulu kala adalah salah satu pusat pelayaran di Indonesia.

c. Padi & Kelapa

Tanaman Padi merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Padi merupakan tanaman yang sangat memberikan manfaat bagi masyarakat Makassar. Sedangkan Tanaman Kelapa merupakan salah satu tumbuhan yang hampir semua bagian tubuhnya bermanfaat, mulai dari batang, buah, air kelapa, daging buah kelapa, hingga tempurung dan daun kelapa. Sehingga perpaduan padi dan kelapa ini melambangkan suatu kemakmuran kota Makassar.

d. Benteng

Benteng berwarna merah berdiri kokoh di belakang perisai putih. Benteng adalah bangunan yang dibuat untuk keperluan pertahanan sewaktu dalam peperangan. Karena itulah benteng melambangkan kejayaan Kota Makassar.

e. Warna pada Tepi Prisai

Tiga warna berbeda sepanjang tepi perisai melambangkan kesatuan dan kebesaran Bangsa Indonesia.

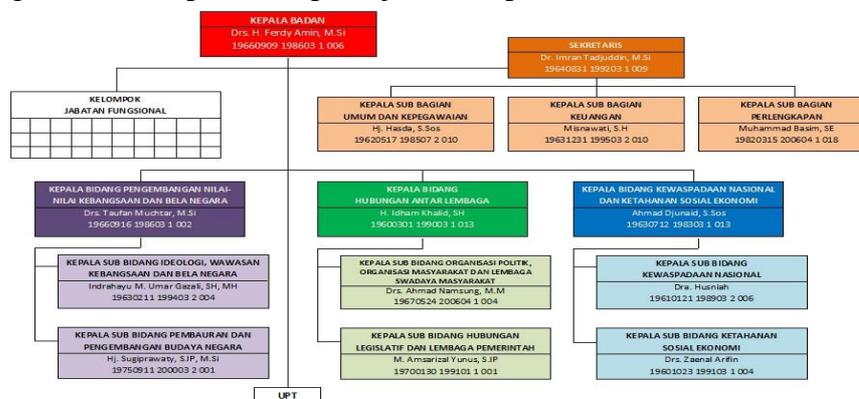
f. Sekali Layar Terkembang, Pantang Biduk Surut Ke Pantai

Sebuah pita berwarna merah yang melambangkan Keberanian, bertuliskan “Sekali Layar Terkembang, Pantang Biduk Surut Ke Pantai” atau “Kualleangi Tallanga Natowalia” Suatu pepatah masyarakat bugis-Makassar yang melambangkan keberanian menjalankan sebuah prinsip dan tentu dengan penuh kearifan dan perhitungan yang matang serta menunjukkan semangat kepribadian yang pantang mundur.

Itulah dia beberapa poin penting yang merupakan arti dan makna dari lambang kota Makassar. Selain itu, tentunya tersirat pula harapan yang sangat besar untuk kota Makassar kota Anjing Mammiri ini.

1.1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dibuat agar tujuan dari perusahaan tercapai. Struktur organisasi memiliki maksud dan tujuan untuk menciptakan koordinasi komunikasi dan adanya kerja sama yang baik diantara para pelaksanaan organisasi, hal ini dimaksudkan agar setiap organisasi mampu mencapai tujuan dari perusahaan.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi

Sumber: Pemerintahkotamakassar.co.id

a. Kepala Badan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- 1) Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) Memberikan bahan rekomendasi dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Melaksanakan tugas lain di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang diberikan oleh Walikota.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan Pelayanan Administrasi meliputi Umum dan Kepegawaian, Keuangan serta perlengkapan bagi seluruh Bidang kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Pengelolaan Ketatausahaan Badan;
- 2) Pelaksanaan urusan Kepegawaian Badan;
- 3) Pelaksanaan urusan Keuangan Badan;
- 4) Pelaksanaan urusan Perlengkapan Badan;
- 5) Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga Badan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi perumusan program kerja dan rapat kerja Badan.

c. Jabatan Sekretaris membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis Ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga Badan;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b) Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat menyurat, kearsipan, serta mendistribusikan surat sesuai bidang;
- c) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan Badan;

- d) Melaksanakan usul kenaikan pangkat dan pensiun;
 - e) Melaksanakan usul kenaikan gaji berkala dan tugas belajar;
 - f) Menghimpun dan mensosialisaikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup Badan;
 - g) Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - h) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
 - j) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- 2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja serta melakukan tugas teknis keuangan. Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyusun rencana dan program kerja sesuai tugas dan fungsinya;
 - b) Mengumpulkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan;
 - c) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing satuan kerja sebagai bahan konsultasi perencanaan;
 - d) Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan Badan;
 - e) Menyusun neraca keuangan Badan;
 - f) Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
 - g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
- 3) Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan barang; Sub Bagian perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a) Menyusun rencana dan program kerja sesuai tugas dan fungsinya;
- b) Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RBU);

- c) Membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB);
 - d) Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU)
 - e) Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan barang Badan;
 - f) Menerima dan meneliti semua pengadaan pada lingkup Badan;
 - g) Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris Badan;
 - h) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
- 4) Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Bela Negara
- Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pengembangan Nilai-Nilai kebangsaan dan bela negara. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara menyelenggarakan fungsi :
- a) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara;
 - b) Menyusun rencana dan program kerja Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara;
 - c) Perumusan bahan/data dan informasi untuk menyusun program Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara;
 - d) Penyusunan perencanaan Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara yang meliputi penyusunan program dan pengembangan wawasan kebangsaan;
 - e) Pelaksanaan monitoring program Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara yang meliputi pemantapan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan agama;
 - f) Penginventarisasian permasalahan yang timbul untuk merumuskan langkah-langkah pemecahannya di Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara;
 - g) Pengkoordinasian kegiatan penyusunan perencanaan Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara;

- h) Pengevaluasian pelaksanaan program agar hasil yang dicapai sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
 - i) Perencanaan kegiatan sosialisasi sesuai dengan potensi daerah untuk pengembangan Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara;
 - j) Pengelolaan administrasi urusan tertentu;
- 5) Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara mempunyai tugas menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program pembangunan bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara.

Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara;
- b) Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara;
- c) Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d) Menyusun konsep penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- e) Mengumpulkan bahan bagi pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;
- f) Menyusun rencana pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

- g) Mengumpulkan bahan bagi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - h) Mengumpulkan bahan bagi peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan;
 - j) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
- 6) Sub Bidang Pembauran dan Pengembangan Budaya Bangsa
- Sub Bidang Pembauran dan Pengembangan Budaya Bangsa mempunyai tugas menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara. Sub Bidang Pembauran dan Pengembangan Budaya Bangsa menyelenggarakan fungsi :
- a) Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara;
 - b) Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara;
 - c) Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - d) Menyusun konsep penetapan kebijakan operasional di bidang pembauran dan pengembangan Nilai-nilai Ketahanan seni budaya, bangsa dan agama;
 - e) Mengumpulkan bahan bagi pelaksanaan kegiatan di bidang pembauran dan pengembangan nilai-nilai ketahanan seni budaya, bangsa dan agama;
 - f) Menyusun rencana pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang pembauran dan pengembangan nilai-nilai ketahanan seni budaya, bangsa dan agama;

- g) Mengumpulkan bahan bagi pegawai penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang pembauran dan pengembangan nilai-nilai ketahanan seni budaya, bangsa dan agama;
- h) Mengumpulkan bahan bagi peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang pembauran pengembangan nilai-nilai seni budaya bangsa dan agama;
- i) Memfasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan dan peningkatan pembauran bangsa serta nilai-nilai ketahanan seni, budaya, bangsa dan agama;
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- k) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

7) Bidang Hubungan antar Lembaga

Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasi fasilitasi dibidang hubungan antar lembaga; untuk menyelenggarakan tugas dimaksud bidang Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- b) Perumusan bahan/data dan informasi untuk pengolah dan penyusunan program bidang Hubungan Antar Lembaga;
- c) Penyusunan perencanaan program fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan lembaga legislatif, lembaga penyelenggaraan pemilihan umum, dan partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, dan lembaga swadaya masyarakat;
- d) Monitoring terhadap pelaksanaan program di bidang Hubungan Antar Lembaga;
- e) Penginventarisasian permasalahan yang timbul dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- f) Pengkoordinasian kegiatan penyusunan perencanaan program bidang Hubungan Antar Lembaga;
- g) Pengevaluasian pelaksanaan program agar hasil yang dicapai sesuai sasaran yang telah ditetapkan;

h) Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

8) Sub Bidang Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat Dan Lembaga Swadaya Masyarakat;

Sub Bidang Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program-program bidang hubungan antara Lembaga. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Sub Bidang Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat Dan Lembaga Swadaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Hubungan antar Lembaga;
- b) Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang hubungan antar Lembaga;
- c) Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d) Menyusun konsep penetapan kebijakan operasional di bidang organisasi politik, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;
- e) Mengumpulkan bahan bagi pelaksanaan kegiatan di bidang organisasi politik, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;
- f) Menyusun rencana pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang organisasi politik, organisasi politik, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;
- g) Mengumpulkan bahan bagi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang organisasi politik, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;
- h) Mengumpulkan bahan bagi peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang organisasi politik, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;

- i) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang organisasi politik, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;
 - j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
 - k) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
- 9) Sub Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Pemerintah;

Sub Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Pemerintah mempunyai tugas menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program-program bidang hubungan antar lembaga.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Sub Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Pemerintah menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang hubungan antar Lembaga;
- b) Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang hubungan antar Lembaga;
- c) Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d) Menyusun konsep penetapan kebijakan operasional di bidang hubungan legislatif dan lembaga pemerintah;
- e) Mengumpulkan bahan bagi pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan legislatif dan lembaga pemerintah;
- f) Menyusun rencana pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan hubungan legislatif dan lembaga pemerintah;
- g) Mengumpulkan bahan bagi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang hubungan legislatif dan lembaga pemerintah;
- h) Mengumpulkan bahan bagi peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang hubungan legislatif dan lembaga pemerintah;

- i) Menyusun rencana dan bahan koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang hubungan legislatif dan lembaga pemerintah;
- j) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga legislatif dalam rangka fasilitasi proses pergantian antar waktu anggota DPRD;
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- l) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

10) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial Ekonomi

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan, membina, dan mengkoordinasikan program-program bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi;

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi;
- b) Penyusunan bahan perencanaan program bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi;
- c) Pengkoordinasian rencana bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi;
- d) Pengkajian dan pengolahan serta penganalisaan bahan/data bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi yang meliputi pelaksanaan deteksi dini serta antisipasi dini potensi konflik dan aksi kerusuhan massa;
- e) Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang timbul dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan nasional kegiatan kewaspadaan nasional dan analisis potensi konflik dan penanganan konflik;
- g) Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

11) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional;

Sub Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan data, mengolah dan menganalisa program-program bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi;

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Sub Bidang Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi;
- b) Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi;
- c) Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d) Menyusun konsep penetapan kebijakan operasional di bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi;
- e) Mengumpulkan bahan bagi pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi;
- f) Menyusun rencana pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi;
- g) Mengumpulkan bahan bagi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi;
- h) Mengumpulkan bahan bagi peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi;
- i) Menyusun rencana dan bahan koordinasi penetapan kebijakan operasional bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi;
- j) Mengumpulkan bahan bagi pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi;
- k) Mempersiapkan bahan bagi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi;

- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- m) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas

12) Sub Bidang Ketahanan Sosial Ekonomi;

Sub Bidang Ketahanan Sosial Ekonomi mempunyai tugas menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program-program pembangunan bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi;

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Sub Bidang Ketahanan Sosial Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial Ekonomi;
- b) Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial Ekonomi;
- c) Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d) Mempersiapkan bahan koordinasi penetapan kebijakan operasional di Bidang Ketahanan Sosial Ekonomi;
- e) Mempersiapkan bahan bagi pelaksanaan kegiatan di Bidang Ketahanan Sosial Ekonomi;
- f) Mempersiapkan bahan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan sosial ekonomi;
- g) Menyusun rencana kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat bidang ketahanan sosial ekonomi;
- h) Mempersiapkan bahan bagi peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan sosial ekonomi;
- i) Mempersiapkan bahan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sosial ekonomi;

- j) Melakukan koordinasi fasilitasi pemantauan dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang ketahanan sumber daya alam dan kesenjangan perekonomian skala kota Makassar;
- k) Melakukan koordinasi fasilitasi pemantauan, dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang perdagangan skala kota Makassar;
- l) Melakuakan koordinas fasilitasi pemantauan, dan kerjasama dengan instansi terkait terhadap perilaku perekonomian masyarakat skala kota Makassar;
- m) Melakukan koordinasi fasilitasi pemantauan, dan kerjasama dengan instansi terkait yang berkenaan dengan kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi skala kota Makassar;
- n) Menyiapkan bahan dalam rangka peningkatan kapasitas apatur dibidang ketahanan sosial ekonomi;
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pada umumnya setiap organisasi memiliki target pengharapan yang besar agar pegawainya dapat mendapatkan peningkatan kinerja di setiap pencapaiannya, Di era globalisasi saat ini persaingan dalam masing-masing organisasi cukup ketat. Karena mengharuskan kantor di tuntutan untuk lebih meningkatkan dalam rangka kelangsungan hidup organisasi.

Dalam melihat peningkatan daya saing sumber daya manusia sangat penting karena sebagai kunci dari keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila keinginan dan tujuan organisasi dapat terwujud, maka sumber daya manusia tersebut tentu berharap hasil dari kerja yang telah di lakukan untuk mendapatkan *feedback* yang sesuai dari kantor. Menurut (Sedarmayanti 2017:3) manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai pengelolaan pemanfaatan individu, dan juga sebagai rangkaian strategis, proses, serta aktivitas yang di desain untuk menunjang tujuan organisasi dengan cara megintegrasikan kebutuhan organisasi dan individu. Manajemen sumber daya manusia yang di kelola dengan baik akan menghasilkan pegawai yang terampil, inovatif sehingga menghasilkan kinerja yang baik, sehingga antar pegawai dapat

saling mendukung terhadap bidang pekerjaan lainnya. Maka dari itu organisasi dapat memberikan penghargaan untuk pegawai yang telah melakukan kinerja terbaik terhadap organisasinya.

Dalam jurnal Rumpak (2016) menyatakan bahwa kinerja di artikan sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan di bidangnya. Kinerja pegawai merupakan hasil kerja dicapai seseorang melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Kinerja pegawai meliputi kualitas, dan kuantitas output serta keandalan dalam bekerja. Pegawai dengan kerja yang baik sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik pula begitupun sebaliknya, maksud kinerja yang baik merupakan indikator penilaian hasil kerja..

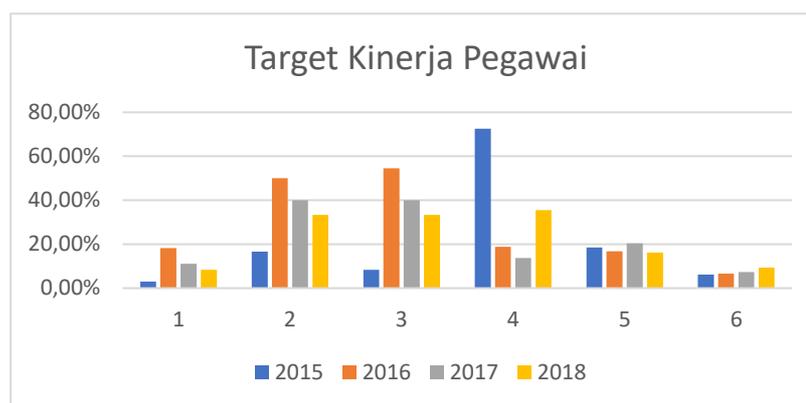
Demikian halnya dengan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Makassar. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis dengan kepala bidang hubungan dan lembaga sumber daya manusia Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Makassar, penulis memilih objek tersebut karena memiliki relasi di internal sehingga memudahkan dalam penelitian dan pengambilan data penulis. Berikut ini hasil rekapitulasi penilaian kinerja Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Makassar, sebagai berikut:

TABEL 1.1
REVIEW PENCAPAIAN LAYANAN KINERJA PEGAWAI

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Rencana Strategis Layanan Pegawai Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Makassar Tahun				Realisasi Capaian Tahun			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Persentase Penurunan perkelahian antar kelompok	76,00%	76,00%	76,00%	76,00%	2,94%	18,18%	11,11%	8,33%
Persentase penurunan konflik umat beragama	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	16,67%	50,00%	40,00%	33,33%
Persentase penurunan konflik antar etnis	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	8,56%	54,55%	40,00%	33,33%
Persentase LSM tertib administrasi organisasi	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	72,58%	18,84%	13,79%	35,48%
Persentase LSM yang menyusun laporan tahunan	70,00%	80,00%	80,00%	80,00%	18,56%	16,78%	20,34%	16,13%
Persentase pelaksana kegiatan yang telah diberikan ijin yang menyusun laporan hasil kegiatan pelaksanaan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	6,21%	6,56%	7,35%	9,40%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Kota Makassar

Untuk melihat lebih jelas bagaimana perbandingan kinerja pada pegawai Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2015 sampai dengan 2018 pada tabel 1.1, maka di sajikan dalam bentuk grafik sebagaimana pada gambar 1.3 dibawah ini :



Gambar 1.3 Target Kinerja Pegawai

Sumber: Olah data penulis, 2019

Berdasarkan tabel dan gambar di atas dapat dilihat bahwa target pencapaian masing-masing indikator kinerja masih jauh dari harapan. Menunjukkan bahwa persentase di atas mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2018 bersifat fluktuatif. Namun cenderung ada beberapa indikator dalam setiap tahunnya mengalami kenaikan signifikan yang hampir mencapai target terjadi pada tahun 2015 sebesar 72,58% pada indikator Persentase LSM tertib administrasi organisasi dari yang di targetkan sebesar 80% sedangkan kinerja pegawai yang masih jauh dari harapan terjadi pada tahun 2018 sebesar 8,33% pada indikator Persentase Penurunan perkelahian antar kelompok dari yang di targetkan sebesar 76%. Dari hasil adanya rekapitulasi data pencapaian kinerja dapat di ketahui bahwa tingkat produktifitas kinerja pegawai Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Makassar harus lebih di tingkatkan, hal ini sesuai menurut kepala bidang hubungan antar lembaga sumber daya manusia di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Makassar yang menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab rendahnya produktifitas kinerja pegawai kurangnya saling memotivasi antar sesama pegawai dalam setiap pekerjaan yang di berikan. Hal tersebut sesuai pendapat Rahmadita dalam Rumpak (2013) yang menyatakan bahwa Motivasi kerja adalah suatu proses dimana kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah tercapainya tujuan tertentu. Tujuan yang jika berhasil dicapai maka akan memuaskan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan pegawai tersebut. Demikian halnya menurut Suseno & Sugiyanto (2010)

Motivasi kerja pegawai yang tinggi akan membawa dampak yang positif bagi kantor dan akan mempengaruhi terciptanya komitmen organisasi.

Melihat arti motivasi, jika seseorang tanpa mempunyai motivasi maka tidak mempunyai hasil kerja yang tinggi. Persoalan dalam memotivasi pegawai merupakan hal yang sukar untuk dilakukan karena dalam diri pegawai terdapat suatu keinginan, kebutuhan, dan harapan yang berbeda antara pegawai. Salah satu yang memegang peranan penting adalah pemimpin untuk memberi motivasi kepada setiap pegawai agar dapat memberikan kinerja yang tinggi dan dapat bekerja dengan baik untuk kemajuan organisasi. Pihak organisasi harus dapat memahami setiap persoalan tentang motivasi lalu mengatasinya, maka organisasi akan dapat menghasilkan kinerja yang optimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Untuk mengetahui bagaimana motivasi pegawai, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada 45 pegawai dan pejabat SKPD Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Makassar.

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat dilihat masih terdapat beberapa pegawai yang kurang mendapatkan *reward* ketika pegawai mendapatkan tambahan jam kerjanya sehingga mempengaruhi motivasi kerja dari para pegawai. Harusnya organisasi memberikan penghargaan atas prestasi kerjanya contohnya seperti pujian, dinaikannya insentif atau pemberian bonus. Priansa (2014:205) menyatakan bahwa Pada dasarnya apabila organisasi ingin meraih kinerja yang optimal sesuai dengan target yang telah ditentukan maka perusahaan harus mampu memberikan motivasi yang baik pada pegawai.

Agar dapat mendapatkan dan memberikan jawaban yang pasti mengenai hubungan antara motivasi terhadap kinerja pegawai, maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menjawab fenomena-fenomena diatas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Makassar”**

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas maka rumusan masalah yang penulis akan melakukan penelitian ini mengidentifikasi masalah:

- a. Bagaimana motivasi pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar?
- b. Bagaimana kinerja pegawai pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar?
- c. Bagaimana pengaruh antara motivasi terhadap kinerja pegawai pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar?

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis motivasi pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pegawai pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara motivasi terhadap kinerja pegawai pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dengan dibuatnya penelitian ini, penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi semua pihak seperti:

- a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu di bidang manajemen sumber daya manusia terutama dalam hal motivasi kerja dan kinerja karyawan.

- b. Aspek Praktis

Dengan penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan salah satu bahan masukan bagi perusahaan terutama untuk mengembangkan motivasi kerja dan kinerja karyawan agar lebih efektif dan efisien.

1.6 Waktu dan Periode

Periode penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2019 s/d Juni 2019. Objek penelitian ini adalah pegawai Kantor SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, Jl. Ahmad Yani No.2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang gambaran objek penelitian, latar belakang, obyek studi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas uraian umum tentang teori-teori yang digunakan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian sebagai acuan perbandingan dalam masalah yang terjadi sehingga akan diperoleh gambaran yang cukup jelas.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, operational variabel, skala pengukuran, populasi, sampel dan teknik pengumpulan data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Karakteristik Responden, Hasil Penelitian, dan Pembahasan Penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran mengenai Penelitian.